



**PEMIKIRAN POLITIK GUS DUR DALAM BUKU *ISLAMKU,*
*ISLAM ANDA, ISLAM KITA***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:

TEGUH WALOYO

NIM. 3312414029

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

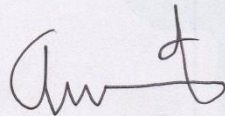
Skripsi dengan judul “Pemikiran Politik Gus Dur dalam Buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita”, ini telah disetujui ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juni 2019

Disetujui oleh:

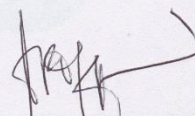
Dosen Pembimbing I



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM

NIP. 197207242000031001

Dosen Pembimbing II

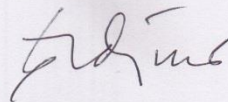


Erisandi Arditama, S.IP, M.A

NIP. 198705012018031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 01 Juli 2019

Penguji I

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si

NIP. 195503281983031003

Penguji II

Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM

NIP. 197207242000031001

Penguji III

Erisandi Arditama, S.IP, M.A

NIP. 198705012018031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 17 Juni 2019

Teguh Waloyo

NIM. 3312414029

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Pemikiran Politik Gus Dur dalam Buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Erisandi Arditama, S.IP, M.A., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen, staf pengajar di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan inspirasi pengalaman bagi peneliti.
7. Keluarga tercinta, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan selama menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.

8. Keluarga besar Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) Universitas Negeri Semarang yang telah menampung penulis untuk belajar dan bermain.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Politik 2014.
10. Seluruh pihak terkait yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 01 Juli 2019

Penulis,

Teguh Waloyo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Indonesia bukan negara agama tapi negara beragama. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, jadi akui agama yang lain.” (Gus Dur)

“Gitu aja kok repot.” (Gus Dur)

Persembahan:

“Saya persembahkan kepada kedua orang tua. Kemudian, saya persembahkan pula kepada Ibu Pertiwi beserta anak bangsa semuanya.”

SARI

Waloyo. Teguh. 2019. Pemikiran Politik Gus Dur dalam Buku *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Moh Aris Munandar, S.Sos, MM. Pembimbing II Erisandi Arditama, S.IP, M.A.

Kata Kunci: Gus Dur, Analisis Wacana Kritis, Hubungan Agama dan Negara, Buku *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Pemikiran Politik.

Hubungan antara agama dan negara selalu menarik untuk dikaji. Topik bahasan ini selalu diperbincangkan publik lintas generasi. Penelitian ini berusaha mengungkap benang merah antara hubungan agama (Islam) dengan negara yang dikemukakan Gus Dur dalam sebuah buku. Dirumuskan dalam rumusan masalah, bagaimana pemikiran politik Gus Dur terhadap konsep negara Islam dalam buku *Islamku Islam Anda Islam Kita*. Data diambil menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Teun A Van Dijk. Metode ini salah satu model yang memandang bahasa berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, serta politik. Ada tiga unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Adapun hasil penelitian ini memuat pemikiran politik Gus Dur. Yaitu pandangan Gus Dur terhadap negara Islam, Islam dan Pancasila, serta orientasi Islam dalam bernegara. Adapun ide besar dari pemikiran politik Gus Dur dalam buku *Islamku Islam Anda Islam Kita* adalah dukungannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian umat Islam tidak memiliki kewajiban untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Seluruh hasil penelitian ini disajikan dalam bangunan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan berdasar teks (struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro), kognisi sosial, dan konteks sosial. Wacana bisa digunakan untuk melakukan pembentukan opini penutur dalam bentuk pilihan kata atau kalimat. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini memuat dua hal. Pertama, saran yang ditujukan kepada kelompok Islam. Kedua, saran ditujukan kepada seluruh elemen bangsa.

ABSTRACT

The relationship between the religion and the state is always interesting to study. This topic of discussion is always discussed by the public across generations. This research seeks to uncover the common thread between the relationship of religion (Islam) and the state that have explained by Gus Dur in a book. formulated in the outline of the problem, how is Gus Dur's political thinking toward the concept of an Islamic state in the book of *Islamku Islam Anda Islam Kita*. The data was taken using the method of documentation and literature review. The analytical method that used in this research is the analysis of critical discourse's model by Teun A Van Dijk. This method is one of the model that considered the language have related to power, ideology, and also politics. There are three units of analysis used in this study, that are text, social cognition, and social interaction. The results of this study included Gus Dur's political thinking. That is Gus Dur's view of the Islamic state, Islam and Pancasila, and the orientation of Islam in the state. The big idea of Gus Dur's political thinking in the book of *Islamku Islam Anda Islam Kita* is his support for Pancasila as an Indonesian ideology that's not contrary to Islamic teachings. Therefore, thus Muslims do not have an obligation to establish an Islamic state in Indonesia. All the results of this research are presented in a qualitative descriptive method. The results of this research are presented by text (macro structure, superstructure, and micro structure), social cognition, and social context. The discourse can be used to form the speaker's opinions in the form of a choice either words or sentences. The suggestions that presented in this research contain two things. First, advices that directed to the Islamic groups. Second, advices that directed to all elements of the nation.

Keywords: Gus Dur, Analysis of Critical Discourse, The Relationship of Religion and State, The Book of *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Political Thought.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
SARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis	13
1. Memahami Konsep Dasar Ilmu Politik	13
2. Keterkaitan Ilmu Politik dan Pemikiran Politik	15
3. Pemikiran Politik Tentang Negara	17
4. Konsep Negara Islam dalam Diskursus Pemikiran Politik	24
5. Pemikiran Politik Gus Dur dalam Diskursus Analisis Wacana Kritis	33
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan	37
C. Kerangka Berpikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Subjek dan Objek Penelitian	42

C. Fokus Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Gambaran Umum Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	47
a. Riwayat keluarga	47
b. Riwayat pendidikan	51
c. Riwayat karir	56
2. Pemikiran Politik Gus Dur Terkait Islam dan Negara dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis	59
B. Pembahasan	92
1. Perihal Negara Islam	92
2. Islam dan Pancasila	112
3. Orientasi Islam dalam Negara	124

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA	138
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	139
-------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skema Penelitian dan Analisis A Teun Van Dijk	46
Tabel 2 Peta Pemikiran Politik Gus Dur	85
Tabel 3 Hasil Analisis Wacana Kritis Perihal Negara Islam Menggunakan Analisis Van Dijk	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gus Dur adalah guru bangsa. Sebagai seorang guru, tentunya banyak pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Sehingga sumbangsih beliau terhadap khazanah keilmuan perlu kita pelajari lagi. Dalam dirinya terdapat kompleksitas pengetahuan. Hingga membawanya menjadi sosok *nano-nano*, yang mana itu istilah permen yang menggambarkan banyak rasa. Begitulah penulis menggambarkan sosok Gus Dur, ia dapat dikatakan sebagai sosok agamawan, politikus, budayawan, juga bisa menjadi pengamat sepak bola. Meski ia berlatar belakang dari pesantren yang notabene mengkaji ajaran agama Islam, tetapi Gus Dur tidak buta dengan disiplin ilmu yang lainnya. Termasuk dalam dunia perpolitikan, kita juga mendapati nama Gus Dur dalam gelanggang ini. Berbagai isu tentang ideologi, demokrasi, dan HAM tampaknya mendapat perhatian lebih dari cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), K.H Hasyim Asy'ari.

Sepak terjang Gus Dur dalam dunia politik tidak sebatas wacana belaka. Jadi, ia bukan hanya melahirkan gagasan melalui berbagai wacana yang ia gulirkan melalui tulisan belaka. Melainkan, ia juga terlibat aktif sebagai praktisi di dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan diantaranya dengan mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai tersebut lahir pasca reformasi dan seketika itu mengikuti pemilu. Menariknya, meski masih tergolong partai kemarin sore, partai tersebut pada pemilu tahun 1999 mampu

meraih suara sebesar 13.336.982 atau 12,61% (*kpu.go.id*). Jumlah suara yang tentunya layak diperhitungkan. Bersama partai barunya serta dibantu koalisinya mampu mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia ke-empat.

Nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman Wahid. Putra dari Kiai Abdul Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama. Ia lahir di Jombang Jawa Timur, 07 September 1940. Kehidupan masa kecil hingga remajanya dihabiskan di dunia pesantren. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren yang lainnya, ia sempat belajar di Pesantren Krpyak (Yogyakarta), Pesantren Tegalrejo (Magelang), dan Pesantren Tambakberas (Jombang). Setelah beranjak dewasa, ia menempuh pendidikan di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir. Lanjut ke Universitas Baghdad, Irak. Dari sana ia mulai akrab dengan pemikiran Islam yang berkaitan dengan politik. Dan pada akhirnya, Gus Dur dikenal dan dikenang oleh banyak orang. Hingga ia mendapat banyak penghargaan, diantaranya adalah Penghargaan Kepemimpinan Global (*the global leadership award*) dari Columbia University, September 2000. *Medals of valour*, sebuah penghargaan bagi personal yang gigih memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme diberikan oleh *Wiesenthal Center*, New York 05 Maret 2009. (*republika.co.id*, Kamis 31 Desember 2009)

Berbicara ihwal politik, Gus Dur bisa dikatakan sebagai salah satu politisi berpengaruh dari kalangan Islam. Pemikirannya terkait diskursus Islam dan negara, juga tentang demokrasi sering mengemuka. Ia juga sosok pejuang demokrasi. Meminjam bahasa Moh. Mahfudh MD, Gus Dur adalah pejuang demokrasi yang egaliter, pluralis, dan humanis. Gus Dur bisa menjadi pejuang

demokrasi yang egaliter, pluralis, dan humanis seperti itu tidaklah hadir dengan sendirinya. Ada lintasan pengalaman dalam perjalanan hidupnya yang berkesan sehingga tidak terlupakan yang turut membentuk sikap dan pandangannya seperti di atas. Diantaranya adalah kejadian tahun 1979, pada waktu itu Gus Dur berkesempatan membaca buku *Ethica Nechomochea*, karya Aristoteles yang hidup empat abad sebelum masehi atau 1.000 tahun sebelum datangnya agama Islam. Buku tersebut kemudian diterjemahkan oleh Ibn Rusyd menjadi *Al-Kitaab al-Akhlaaq*.

Buku tersebut menuntun dan mengilhami Gus Dur untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang mulia tentang toleransi, egaliterianisme, dan masalah-masalah mendasar lain dalam hubungan antar sesama manusia. Gus Dur (dalam Mahfudh, 2016: 80) menjelaskan bahwa setelah membaca buku tersebut, ia menangis meraung-raung karena menemukan cara memahami kemuliaan ajaran Islam justru dari buku yang lahir jauh sebelum datangnya Islam. Kalau tidak membaca buku itu, mungkin ia menjadi seorang fundamentalis.

Pemikiran politik Gus Dur yang mengemuka berkaitan dengan hubungan antara agama (Islam) dengan negara. Sebuah pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara agama dengan negara. Berpijak dari pandangan ini, maka ia dengan tegas menolak upaya formalisasi, ideologisasi, syari'atisasi Islam dalam institusi negara. Sebaliknya, Gus Dur melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Ketidaksetujuan Gus Dur terhadap formalisasi Islam itu terlihat, misalnya terhadap tafsiran ayat Al Qur'an yang berbunyi "*udhkuluu fi al silmi kaffah*", yang

seringkali ditafsirkan secara literal oleh para pendukung Islam formalis yang menghendaki format kenegaraan berbasis Islam. Jika kelompok Islam formalis yang menafsirkan kata "*al silmi*" dengan kata "Islami". Konsekuensi dari tafsir tersebut adalah bermakna bahwa perjuangan mewujudkan negara Islam adalah suatu kewajiban agama. Lain halnya dengan Gus Dur dan banyak ulama lainnya yang menafsirkan kata tersebut dengan "perdamaian". Tafsir ini bermakna bahwa memperjuangkan negara Islam bukan merupakan suatu kewajiban.

Mereka yang terbiasa dengan formalisasi, akan terikat kepada upaya-upaya untuk mewujudkan "sistem Islami" secara fundamental dengan mengabaikan pluralitas masyarakat. Akibatnya, pemahaman seperti ini akan menjadikan warga negara non-muslim menjadi warga negara kelas dua. Bagi Gus Dur, untuk menjadi muslim yang baik, seorang muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan ujian. Konsekuensinya, mewujudkan sistem Islami atau formalisasi tidaklah menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat sebagai muslim yang taat.

Adapun untuk menjadi muslim yang taat cukup dengan menjalankan rukun Islam dan rukun iman dengan konsekuen. Menjalankan kedua rukun tersebut dimanifestasikan pula dalam kehidupan bermasyarakat dengan menebar kebaikan kepada sesama manusia. Hal demikian sudah cukup untuk dapat dikatakan sebagai muslim yang taat. Jadi, dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, tidak serta merta membatalkan predikat sebagai muslim yang

taat. Predikat muslim yang taat tidak memerlukan syarat dengan terlibat dalam menciptakan negara Islam. Dengan demikian, memperjuangkan ide negara Islam di Indonesia yang plural tidak menjadi relevan. Apalagi memperjuangkan ide negara Islam dengan teror dan kekerasan. Cara-cara tersebut sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang menjunjung perdamaian.

Gus Dur (dalam Ridwan, 2016: 67) juga menyatakan bahwa tidak ada konsep negara Islam dalam Islam. Inilah yang menjadikan mengapa NU tidak memperjuangkan Indonesia menjadi NII. Kemajemukan yang tinggi dalam bangsa kita, membuat kita hanya dapat bersatu dan kemudian mendirikan negara, yang tidak berdasarkan satu agama tertentu. Kenyataan seperti inilah yang sering dikacaikan oleh orang yang tidak mau mengerti bahwa mendirikan sebuah NII tidak wajib bagi kaum muslimin, tetapi mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib.

Berdasarkan argumen tersebut, Gus Dur menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pembelaan Gus Dur kepada Pancasila juga terekam dalam wawancara dengan Douglas E Ramage (dalam Ridwan, 2016: 68), dalam kesempatan tersebut Gus Dur mengatakan negara Indonesia tanpa Pancasila akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan Gus Dur pertahankan dengan apapun termasuk bertaruh nyawa. Tidak peduli apakah Pancasila dikebiri oleh angkatan bersenjata atau dimanipulasi umat Islam.

Jika hingga dewasa ini masih ada yang hendak mempersoalkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, musti dilawan. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai simpul yang mampu mengikat dan menyatukan segala kemajemukan yang ada di Indonesia. Keberadaan Pancasila juga merangkul agama Islam dan agama lainnya untuk dapat hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Adapun ada sebagian kecil dari kelompok Islam yang menganggap Pancasila bertentangan dengan agama Islam merupakan benalu bagi Indonesia yang majemuk. Pandangan yang mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah pandangan yang dihasilkan dari kesempitan berpikir dan kesempitan memahami hakikat agama Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan sumber pokok agama Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits tidak menjelaskan secara konseptual terkait bangunan kenegaraan.

Pemikiran politik Gus Dur juga sesuai dengan teori yang dikemukakan para ilmuwan politik. Budiardjo (2008) Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Lebih jauh, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem, serta melaksanakan cara-cara tujuan itu. Sedangkan menurut Rod Hague (dalam Budiardjo, 2008: 16) menjelaskan bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (*politic is*

the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members).

Selain sebagai pembela ideologi Pancasila, Gus Dur juga getol dalam memperjuangkan demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh politik Indonesia. Pembelaan Gus Dur terhadap demokrasi juga ia legitimasi menggunakan dalil keagamaan. *Tasharruf al-imam ala ar-raiyatihi manuthun bi al-mashlahah* (tindakan pemegang kekuasaan rakyat harus berpijak pada kemashlahatan mereka). Ia memberikan tafsir atas dalil tersebut dengan mengatakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan di muka UU. Jadi *weltanschaung* Islam sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasikan kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang untuk membantu atau mendukung kemashlahatan rakyat. Di sinilah Islam bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu formaslisasi seperti pemaksaan atas pemberlakuan Konstitusi Islam atau Perda Syariah (Ridwan, 2016: 65).

Gus Dur sebagai seorang agamawan lebih memilih substansi dari ajaran Islam. Bukan sekadar berhenti pada teks yang mati. Yakni lebih mengutamakan isi daripada sampul. Adapun substansi Islam dalam negara adalah mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hingga pada akhirnya ia memilih demokrasi sebagai sistem politik dengan Pancasila sebagai dasar negara. Gus Dur (dalam Ridwan, 2016: 70) menjelaskan orientasi seorang pemimpin terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Ini berarti Islam tidak mebeda-bedakan antara kepemimpinanan negara dengan kepemimpinan masyarakat, juga mengenai bentuk dan batas waktunya. Serta tidak

memikirkan format kenegaraan yang melatari kepemimpinan itu, apakah itu imperium dunia, republik negara bangsa, atau negara kota. Selama kepemimpinan itu mendatangkan kesejahteraan masyarakat, selama itu pula kepemimpinan memiliki legitimasi dalam pandangan umat Islam.

Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila juga turut berpengaruh kepada penerimaan NU secara kelembagaan terhadap ideologi Pancasila. Dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo 1984. Gus Dur tergabung dalam Komisi Khittah yang membahas paradigma, gagasan dasar, dan konsep hubungan Islam dan Pancasila. Gus Dur memimpin Sub Komisi yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Beliau menunjuk lima orang Kiai sebagai anggotanya, yaitu Musthofa Bisri (Gus Mus), K.H. Dr. Hasan, K.H. Zahrowi, K.H. Mukaffi Makki, dan dr. Muhammad.

Hasil keputusan NU menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hasil tersebut merupakan hasil dari Sub Komisi terkait pembahasan hubungan Islam dan Pancasila yang dipimpin Gus Dur. Keputusan tersebut juga diamini oleh K.H. Ahmad Shiddiq yang kala itu terpilih sebagai Rais 'Aam PBNU. K.H Ahmad Shiddiq (dalam Muhammad, 2015: 53) dalam pidatonya menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh *nation*. Para ulama dalam NU, meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial.

Pemikiran politik Gus Dur terkait relasi agama dan negara penting untuk dikaji kembali. Agar generasi sekarang dan akan datang tidak ada lagi yang berupaya untuk membenturkan antara agama dan ideologi Pancasila yang kita yakini bersama. Dalam kesempatan ini, pengkajian itu akan penulis lakukan melalui karya ilmiah skripsi yang berjudul "*Pemikiran Politik Gus Dur dalam Buku: Islamku Islam Anda Islam Kita*". Buku tersebut diterbitkan Wahid Institute pada tahun 2006. Adapun di dalamnya berupa kumpulan artikel-artikel Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari berbagai macam topik bahasan. Dari berbagai topik yang dituliskan Gus Dur, terdapat pula topik seputar politik. Diantaranya berupa tulisan berjudul: *Adakah Sistem Islami?; Islam dan Formalisme Ajarannya; Islam: Ideologis Ataupun Kultural?; Islam dan Orientasi Bangsa; Negara Islam, Adakah Konsepnya?; Islam dan Perjuangan Negara Islam; Islam, Negara dan Rasa Keadilan; Negara dan Kepemimpinan dalam Islam; Islam: Perjuangan Etis ataupun Ideologis?*

Penulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai gagasan dan pemikiran Gus Dur dalam bidang politik. Tentunya akan menarik, terlebih berkenaan relasi antara agama dan negara. Pembahasan hal semacam ini hingga hari ini masih relevan. Relevansi pembahasan topik mengenai relasi agama dan negara tidak terlepas dari kondisi masyarakat saat ini. Dimana hingga saat ini masih ada kelompok yang menghendaki untuk mengubah dasar negara Pancasila menjadi ideologi yang menunjukkan superioritas kelompok tertentu. Padahal, Pancasila merupakan ideologi yang sudah disepakati bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pemikiran politik Gus Dur terhadap konsep negara Islam dalam buku *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran politik Gus Dur terhadap konsep negara Islam dalam buku *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*.

D. Menfatat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
 - a. Memperkaya literatur terkait bidang pemikiran politik.
 - b. Sebagai rujukan penulis lain dalam memahami pemikiran Politik Gus Dur.
2. Manfaat praktis
 - a. Mengkampanyekan pemikiran politik Gus Dur dalam memahami negara dari perspektif Islam.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

E. Batasan Istilah

1. Pemikiran dan Pemikiran Politik

Pemikiran adalah kerja otak berupa usaha berfikir yang menyebabkan pikiran mendapatkan sesuatu hal baru dari apa yang sudah diketahui. Pemikiran masing-masing orang memiliki perbedaan dengan segala ciri khasnya yang juga

berbeda-beda sehingga dengan sendirinya terwujud hasil pemikiran dalam berbagai bidang dan timbulnya pemikiran seseorang sebagai reaksi atas pemikiran orang lain. Proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lain, dari proposisi ke proposisi lainnya dari apa yang sudah diketahui kepada hal yang belum diketahui.

Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik. Pemikiran politik sangat erat hubungannya dengan filsafat dan sejarah. Pemikiran politik berkembang dan berubah sesuai dengan waktu dan tempat dimana tiap waktu dan tempat memiliki ciri tersendiri yang mempengaruhi pemikiran politik seseorang. Pemikiran politik yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini berupa pandangan Gus Dur terkait relasi agama Islam dan negara.

2. Negara

Sumantri (dalam Syafiie, 2013: 79) Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

3. Negara Islam

Suatu sistem tata kelola negara yang berdasarkan ajaran agama Islam yaitu berpatokan pada kitab suci Al Quran sebagai firman Allah dan Al Hadits sebagai pedoman yang datang dari Rasul.

4. Pemikiran Politik Gus Dur

Penulis berusaha mengkaji pemikiran politik Gus Dur dalam buku “Islamku Islam Anda Islam Kita”. Lebih khusus, terkait dengan hubungan antara agama (Islam) dan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Memahami Konsep Dasar Ilmu Politik

Menurut Budiardjo (2008: 15) Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Adapun Roger F. Soltau (*dalam* Budiardjo, 2008: 17), dalam buku *Introduction to Politics* mengatakan: "Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara . . . dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antar negara. (*Political science is the study of the state, its aim or purposes . . . the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states*).

Adapun menurut Syafie (2013: 55-56) pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada ghalibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat. Jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara. Sedangkan ilmu negara itu sendiri statis dan deskriptif, karena terbatas hanya melukiskan lembaga-lembaga politik tetapi tidak menyelidiki hal-hal seperti *pressure group*, *interest group*, elite politik, pendapat umum, peranan partai politik, dan lain-lain yang diselidiki ilmu politik.

Menurut Rod Hague *et al* (dalam Budiardjo, 2008: 16) Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. (*Politic is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).

Menurut Andrew Heywood (dalam Budiardjo, 2008: 16): “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. (*Politics is the activity trough which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricaly linked to the phenomen of conflict and cooperation*).

Syafiie (2013: 56) menyajikan beberapa definisi ilmu politik dari beberapa ahli. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, proses negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan (Wilbur White). Ilmu politik adalah ilmu tentang negara dan pemerintahan (Gilchrist). Ilmu politik menyelidiki negara dalam keadaan bergerak (Adolf Grabowsky). Politik juga bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik dan pembagian atau kata-kata yang serumpun (Hoogerwerf).

Mengutip Budiardjo (2008) dalam *contemporary political science*, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi dalam empat bidang: (1) Teori politik. (2)

Lembaga-lembaga politik. (3) partai-partai, golongan-golongan (*groups*). Dan pendapat umum. (4) Hubungan Internasional. Adapun yang dikaji dalam skripsi ini adalah termasuk teori politik. Lebih tepatnya mengarah pada ide-ide politik yang berkaitan dengan Gus Dur.

2. Keterkaitan Ilmu Politik dan Pemikiran Politik

Pemikiran politik merupakan bagian dari kajian ilmu politik. Ada kaitan di antara keduanya. Setidaknya hal ini bisa dijelaskan melalui argumentasi beberapa tokoh. Suyahmo (2014: 4) proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke proposisi lainnya, dari apa yang sudah diketahui kepada hal lain yang belum diketahui. Tentunya semua manusia mengalami proses berpikir karena diberikan akal pikiran. Akan tetapi, tidak semua manusia yang berpikir menghasilkan suatu pemikiran yang mendalam atau sampai pada suatu titik kefilosofan. Suyahmo (2016: 2) berfilosofan berarti berpikir secara mendasar, mendalam, untuk mendapatkan hakikat, substansi dari sesuatu yang dipikirkan.

Lebih jauh lagi, Kaelan (2002: 12-19) memberikan kriteria untuk dapat dikatakan berpikir secara kefilosofan. Kriterianya adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis, senantiasa mempertanyakan segala sesuatu, problem atau hal-hal yang lain yang sedang dihadapi oleh manusia.

- b. Berpikir terdalam, berpikir bukan hanya sampai pada fakta-fakta yang sifatnya sangat khusus dan empiris belaka namun sampai pada intinya yang terdalam yaitu substansi yang bersifat universal.
- c. Bersifat konseptual, berpikir bukan hanya sampai pada persepsi belaka, namun sampai pada pengertian-pengertian yang bersifat konseptual.
- d. Koheren (runtut), pemikiran kefilosofan yang berusaha menyusun suatu bagan yang konseptual yang koheren.
- e. Bersifat rasional, pemikiran kefilosofan berusaha menyusun dengan bagan konseptual yang rasional atau berhubungan secara logis antara satu dengan yang lain.
- f. Bersifat menyeluruh, berarti bahwa suatu pemikiran kefilosofan bukan hanya berdasarkan pada suatu fakta yang khusus individual tetapi sampai pada kesimpulan yang sifatnya paling umum.
- g. Bersifat universal, berarti bahwa kesimpulan yang bersifat umum bagi seluruh umat manusia.
- h. Bersifat spekulatif, pengajuan dugaan yang masuk akal yang melampaui batas-batas fakta.
- i. Bersifat sistematis, perenungan kefilosofan yang dicirikan secara komprehensif, universal serta runtut senantiasa merupakan suatu keseluruhan yang bersistem dan bersifat bebas, sifat berpikir secara kefilosofan adalah berpikir secara bebas untuk sampai pada hakikat yang terdalam dan universal.

Adapun berdasarkan kriteria berpikir kefilosofan di atas, maka pemikiran politik Gus Dur termasuk di dalamnya. Hal ini disebabkan, pemikiran Gus Dur

mencakup politik suatu kenegaraan. Lebih jauh, akan dijelaskan mengenai pemikiran politik oleh beberapa ahli di bidangnya. Deliar Noer (1982) dalam buku berjudul “Pemikiran Politik di Negeri Barat” terdapat kalimat “.....pemikiran-pemikiran ataupun teori politik.....”. Berangkat dari sana, penulis menganggap pemikiran politik memiliki makna yang berdekatan dengan artian teori politik. Sehingga penulis akan menjelaskan apa itu pemikiran politik menggunakan definisi dari teori politik. Ada pemikiran politik sendiri dapat diartikan lebih kepada hasil dari permenungan seseorang terkait realitas politik yang ada. Adapun yang hendak dicapai dalam pemikiran politik adalah untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

3. Pemikiran Politik Tentang Negara

Pemikiran politik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah pemikiran politik Gus Dur tentang hubungan antara negara dengan agama. Budiardjo (2008: 17) negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan menurut Sumantri (dalam Syafiie, 2013: 79) negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Adapun Hoegerwerf (dalam Syafiie: 79-80) negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-

kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya di daerah ini. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan negarapun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan-badan internasional dan supra nasional. Kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan oleh warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara yaitu pemerintahan.

Budiardjo (2008: 51-54) memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur negara. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Wilayah

Selagi negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai batas tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

b. Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.

Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini nampak dari misalnya dalam kebudayaannya, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya. Kesamaan

dalam sejarah perkembangannya (misalnya selama lebih dari tiga ratus tahun menjadi tanah jajahan), kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa faktor-faktor tersebut di atas juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh.

c. Pemerintah

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari sebuah negara. Berbagai macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil dengan menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan (kecuali jika dicaplok oleh negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

d. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat Undang-Undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati Undang-Undang serta semua peraturannya (kedaulatan

ke dalam – *internal sovereignty*). Di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.

Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagi kalau menghadapi masalah dalam hubungan internasional; perjanjian-perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan sesuatu negara. Kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.

Berbicara perihal kedaulatan tidak cukup sampai disitu. Karena ada berbagai teori yang membicarakan muasal kedaulatan suatu negara itu terbentuk. Dari perkembangan logis historis, teori kedaulatan dapat diklasifikasikan ke dalam enam teori dengan pendekatan menyeluruh (Nurtjahjo, 2008: 31-37), yaitu:

1) Teori kedaulatan Tuhan

Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan dianggap tempat bergantung yang paling utama. Tidak boleh ada yang menganggap apa atau siapapun yang lebih tinggi kekuasaannya dari Tuhan.

2) Teori kedaulatan raja

Raja biasanya bersandar pada kemampuannya untuk meyakinkan rakyat bahwa ia dan keturunannya yang berhak diangkat ke dalam kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi. Tuhanlah yang memberikan hak untuk memerintah secara mutlak kepada para raja. Oleh karena itu, kekuatan politik yang dimiliki oleh para raja tidak dapat dicabut oleh rakyat jelata.

3) Teori kedaulatan rakyat

Teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.

4) Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum ini timbul sebagai penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Teori ini dikembangkan oleh Krabbe yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi tidak terletak pada raja, tidak juga pada 'negara', tetapi berada pada hukum, hukum yang bersumber pada kesadaran hukum dari setiap orang.

5) Teori kedaulatan negara

Yaitu segalanya demi negara. Karena negara yang menurut kodratnya mempunyai kekuasaan mutlak.

6) Teori kedaulatan plural

Ide dasarnya adalah bahwa kedaulatan tidak terletak pada *single subject* sebagaimana pemikiran dari teori-teori kedaulatan sebelumnya. Kedaulatan tidak ditempatkan atau dimiliki secara singular melainkan secara plural. Kedaulatan tersebar di dalam kekuasaan kelompok-kelompok masyarakat yang memengaruhi pengambilan keputusan umum dan tersebar dalam kekuasaan lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi negara secara keseluruhan.

Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk: *negara kesatuan (unitarianisme)* dan *negara serikat (federasi)*. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: *sentral* dan *otonomi*.

a) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.

b) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem

pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan Pasca-Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini.

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.

Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: *monarki*, *oligarki*, dan *demokrasi*. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki memiliki dua jenis: *monarki absolut* dan *monarki konstitusional*. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. Adapun, monarki konsitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahannya (Perdana Menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara.

Praktik monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di beberapa negara, seperti, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Dalam model monarki konstitusional ini, kedudukan raja hanya sebatas simbol negara. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sedangkan pemerintahan model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada

kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

4. Konsep Negara Islam dalam Diskursus Pemikiran Politik

Nasiwan (2012: 60) Islam politik adalah perjuangan Islam di bidang politik. Persepsi politik Islam ini bersifat ideologis, dimana pikiran manusia dipengaruhi oleh garis panduan politik yang lebih bersifat “simbolik ideologis Islam”. Teori ini merupakan pengantar yang membawa kita pada diskursus negara agama. Lebih tepatnya negara Islam. Hal ini didasarkan pada interpretasi bahwa mendirikan sebuah negara harus sejalan dengan konsep keyakinan akan keagamaannya. Yang mana agama adalah pegangan hidup bagi penganutnya sebagai jalan untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun pada kehidupan pasca dunia. Mark Juergensmeyer (dalam Nasiwan, 2012: 63) menyatakan di berbagai belahan dunia yang dihuni oleh muslim telah timbul suatu gerakan-gerakan Islam dengan dorongan yang kuat untuk menentang “negara sekuler”.

Hal ini juga mengacu pada masa Nabi Muhammad yang menjadi panutan muslim. Syafiie (2010) Nabi Muhammad Saw melaksanakan politik kenegaraan, mengirim dan menerima duta, memutuskan perang dan membuat perjanjian serta bermusyawarah. Akan tetapi dalam kekuasaan tertinggi menempatkan Allah sebagai raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan atau seperti dikatakan oleh Dr Rahan Zanudin M A bahwa dalam pandangan Islam, Tuhan menempati posisi yang amat sentral dalam

setiap bentuk dan manifestasi pemikiran. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi atas kehendak-Nya.

Menurut teori-teori politik Islam klasik, konsep negara merupakan inti filsafat politik Islam. Istilah negara (*dawlah*) dalam literatur Islam yaitu Al-Qur'an, memang tidak ditemukan satu ayatpun, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu. Usaha memahami masalah politik dalam Islam memang bukan perkara sederhana. Hal itu menurut Nurcholis Madjid, karena ada dua alasan. *Pertama*, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga akan merupakan suatu kenaiifan jika dianggap bahwa selama waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stasioner dan berhenti. Sementara hanya sedikit sekali di kalangan kaum muslim yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah itu. *Kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa sejarah.

Banyak diantara sarjana modern melukiskan Nabi Muhammad adalah "sebagai Nabi penguasa atas komunitas Islam", walaupun dalam kenyataannya Nabi tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penguasa. Nama Hasan Al-Mawardi (meninggal 1058 M) cukup terkenal dalam sejarah Islam. Karyanya yang membicarakan secara luas mengenai pemerintahan dijadikan rujukan dalam zaman modern ini. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Hukum Pemerintahan) merupakan karangan ilmiah pertama tentang ilmu politik dan administrasi negara dalam

sejarah Islam. Seorang pemikir Islam yang mula-mula dianggap paling komprehensif mengagas konsep Negara Islam adalah Jamaluddin Al-Asadabadi (1838-1897) atau yang kemudian dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Setidaknya ada dua hal menurutnya yang mendorong kehendak untuk melaksanakan Negara Islam ini, yaitu :

- a. Al-Afghani melihat betapa lemahnya umat Islam dan para penguasanya menghadapi imperialisme barat pada waktu itu, sehingga perlu dibangkitkan gerakan Pan-Islamisme untuk mempersatukan kekuatan politik Islam.
- b. Gerakan semacam ini tidak mungkin lahir tanpa umat Islam merumuskan kembali Islam sebagai ideologi, nilai peradaban dan identitas kebudayaannya sendiri menghadapi tantangan modernitas barat. Dalam konsep Negara Islam terpadu semua itu, kata Al-Afghani, janganlah hanya membicarakan Islam dari sudutnya sebagai agama ritual yang sempit, tetapi bagaimana melakukan elaborasi secara intelektual-religius agar bisa mendiskusikan hal-hal seperti berkaitan dengan soal hukum Islam, soal kelembagaan sosial Islam, dan soal-soal berhubungan dengan kekuasaan serta wilayah politik lainnya.

Gagasan Islam seperti itu yang kemudian sering dikatakan sebagai awal munculnya modernisme Islam. Memang selain menumbuhkan semangat menentang terhadap hegemoni barat, tetapi kalau diambil positifnya secara jujur bahwa sikap militansi yang tampak bercorak fundamentalistik ini sesungguhnya juga mengandung keterbukaan. Ide dan konsep mengenai Negara Islam pada akhirnya sampai ke Indonesia dalam sejarah prakemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Salah seorang pahlawan nasional, Muhammad Natsir sangat

dikenal di Indonesia juga luar negeri sebagai seorang tokoh Islam yang gigih untuk membela Islam sebagai dasar negara. Ide dan pemikirannya telah membuat catatan sejarah baru bagi perkembangan umat Islam di Indonesia.

Adapun alasan Natsir memperjuangkan ide negara Islam pernah ia sampaikan di dalam forum sidang Konstituante. Menurutnya, dasar negara adalah bersumber dari sistem keyakinan masyarakat tersebut. Natsir (2014: 50) Nyatalah bagi kita bahwa negara itu harus memiliki akar yang tertanam kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu dasar negara pun harus suatu paham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang jelas, dan dapat dipahami. Pendek kata, yang menyusun hidup sehari-hari bagi rakyat, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Ia melihat bahwa sistem keyakinan yang hidup di negara Indonesia bersumber dari ajara agama, dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi yang mengunggulkan suara mayoritas. Di Indoensia, paham hidup yang menggerakkan jiwa rakyat Indoensia adalah agama. Dengan sendirinya asas negara kita berdasar agama, bukan suatu rangkaian yang berupa ide yang dianggap oleh masyarakat umum, sebagai Pancasila. Pancasila tidak dipercaya sebagai agama. Meskipun di dalamnya terumus “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” sumbernya adalah sekuler, *la-diniyah*, tanpa agama (Natsir, 2014: 81).

Ia menganggap bahwa agama Islam sangat layak untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Dikarenakan Islam merupakan ajaran yang lengkap. Meliputi dimensi ibadah dan muamalah. Dalam hal muamalah itulah Islam juga mencakup perihal sosial politik. Seperti semula, tafsiran yang mengatakan Islam

harus dijadikan dasar negara ini dikuatkan dengan argumen mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan demikian Indonesia layak untuk dibangun negara Islam. Natsir (2014: 88) Islam adalah satu agama yang hidup dalam sebagian besar rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Unsur ibadah dan muamalah. Unsur yang kedua ini, yaitu unsur muamalah, meliputi kehidupan secara perorangan, kehidupan secara kekeluargaan, dan kehidupan kenegaraan. Dengan dasar argumen tersebut, Natsir menghendaki demokrasi Islam.

Lain Natsir lain pula pemikiran dari Nurcholish Madjid. Cak Nur, sapaan akrab untuk Nurcholish Madjid dikenal pula sebagai pembaharu Islam. Gagasannya yang bersumber ajaran agama Islam juga meliputi pandangan tentang kenegaraan melalui perspektif tafsirnya terhadap Islam. Bagi Cak Nur, Islam merupakan agama yang meliputi ibadah dan muamalah. Akan tetapi, masyarakat muslim untuk urusan dunia seperti negara diberi kebebasan untuk menentukan bentuknya sendiri. Karena tidak ada aturan baku dalam sumber ajaran agama Islam. Madjid (1992) itulah dasar pandangan bahwa urusan dunia (*umur al-dunya*), seperti masalah kenegaraan, berbeda dengan urusan agama (*umur al-din*), meskipun antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab menurut Cak Nur, kaum muslim diberi kebebasan oleh Nabi, perihal urusan dunia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk belajar kepada non Islam sekalipun.

Konsep bentuk negara yang ditawarkan Cak Nur adalah bentuk negara yang mengayomi. Dalam artian, dasar negara dari sebuah negara haruslah

disepakati dan dapat diterima oleh semua rakyat negara tersebut. Adapun untuk konteks Indonesia yang plural, tidak ada masa depan Indonesia yang menggunakan dasar negara agama tertentu. Apabila dipaksakan akan terjadi benturan dalam pluralitas tersebut. Maka mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua golongan menjadi sebuah keharusan. Titik temu untuk Indonesia yaitu Pancasila. Madjid (*dalam* Nafis, 2014: 232) semangat mencari titik temu yang diperintahkan Tuhan di atas itu diwujudkan oleh Rasulullah dalam bentuk sosial-politik. Maka, pada tataran struktural dan politik, menurut Cak Nur Nabi berusaha mencari titik pertemuan dengan berbagai golongan di Madinah dengan terlebih dahulu mengakui hak eksistensi tiap-tiap kelompok dalam dokumen yang terkenal sebagai Konstitusi Madinah

Nasiwan (2012) ada tiga responsi berkaitan dengan masalah hubungan antara Islam dan negara (*state*) yaitu responsi integratif, responsi fakultatif, dan responsi konfrontatif. (1) Responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara mereka dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. (2) Respon fakultatif, jika kekuatan mereka cukup besar di DPR dan MPR maka akan membuat Undang-Undang (UU) yang sesuai dengan ajaran Islam, kalau tidak mereka tidak akan memaksakan kehendak. (3) Responsi konfrontatif, yaitu sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami.

Dalam teori politik Islam, secara garis besar dibagi atas dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Dua spektrum ini mengakui sama-sama

mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, tetapi memiliki penafsiran yang berbeda atas ajaran Islam. Pada ujung spektrum, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara. Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara bangsa '*nation state*' bertentangan dengan konsep umat (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, aplikasi *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern. Dengan kata lain, perspektif ini meletakkan sistem politik modern dalam posisi bertentangan dengan ajaran Islam (Effendy, 1998: 12).

“*Al Islam, al-Aqidah ar-Ruhiyah wa al-Aqidah as-Siyasah*” Islam mempunyai keunikan dibandingkan dengan agama maupun ideologi yang lain. Islam dari segi ajarannya bukan saja agama yang mengurus masalah spiritual (*ruhiyah*) akan tetapi juga meliputi masalah politik (*siyasah*) atau dengan kata lain Islam adalah akidah spiritual dan politik. Sebagai agama dan ideologi, Islam adalah ajaran yang mengandung akidah dan sistem (*nizam*). Islam adalah agama yang mengandung akidah dan syariah. Karena Islam mengajarkan konsep spiritual (*aqidah ruhiyah*) sekaligus, dan politik (*aqidah siyasah*) sekaligus, maka Islam pun mengajarkan serta mempunyai sistem yang berkenaan dengan masalah *siyasah* di samping sistem yang berkaitan dengan *ruhiyah* (Abdurrahman, 1998: 17,29).

Maarif dalam (Nasiwan: 2012) di ujung spektrum lain, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku

tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan umat. Lebih lanjut, Effendy (1998: 14) dalam pandangan aliran pemikiran ini, al-Qur'an bukanlah buku tentang ilmu politik. Istilah negara (*daulah*) tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah dalam al-Qur'an tidak merujuk atau seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik. Namun demikian, aliran pemikiran ini mengakui bahwa di dalam al-Qur'an terkandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis, mengenai aktifitas sosial politik umat manusia. Ajaran-ajaran itu mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Perspektif ini memandang tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Tidak ada landasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem politik modern.

Secara global, di dunia Islam dewasa ini, wacana tentang pemikiran teori politik Islam, paling tidak ada tiga aliran tentang hubungan antara Islam dengan ketatanegaraan. Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia dan Tuhan belaka. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap, mencakup pengaturan bagi semua aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Sistem kenegaraan harus sepenuhnya mengacu pada Islam, tidak perlu meniru barat. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini adalah antara lain Syeikh Hasan Al Banna, Sayyid Qutb, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Abul 'Ala Maududi.

Aliran kedua, berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi hanya sebagai seorang Rasul semata, bukan sebagai kepala negara. Tokoh dari aliran ini di antaranya Ali Abd Al Raziq dan Thoha Husein. Aliran ketiga, kelompok ini menolak pendapat bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat suatu sistem ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini menolak anggapan Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan Tuhan dengan manusia. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokohnya Muhammad Husein Haikal.

Menurut M. Rusli Karim (dalam Karim, 1999: 15) pemikiran politik di kalangan umat Islam dikenal adanya empat corak. Pertama, modernis yang bersemboyan mengintegrasikan demokrasi barat dengan Islam. Kedua, tradisional yang diwakili para ulama. Kelompok ini memandang tidak perlu adanya perubahan doktrin dan selalu mendukung pemerintah. Ketiga, fundamentalis yang berusaha kembali kepada asas teokrasi Islam yang digariskan sejak awal. Keempat, nasionalis-sekuler yang mendukung modernisasi dan sekulerisasi untuk melegitimasi pemerintahan baru.

Melihat peta pemikiran politik Gus Dur, maka dirinya termasuk ke dalam kelompok modernis. Kelompok yang bersemboyan mengintegrasikan demokrasi barat dengan Islam. Gus Dur juga menolak pendapat bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap dan dalam Islam terdapat suatu sistem ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini menolak anggapan Islam adalah agama dalam pengertian

barat yang hanya mengatur hubungan Tuhan dengan manusia. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

5. Pemikiran Politik Gus Dur dalam Analisis Wacana Kritis

a. bahasa dan teks

Analisis wacana berkaitan dengan dua kata kunci: yakni bahasa dan teks. Alkhadiyah (dalam Zulaeha.,dkk, 2015: 43) bahasa merupakan alat komunikasi yang utama dan paling sederhana, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status, bahasa tidak dapat ditinggalkan. Bahasa sebagai sarana bernalar, bagaimana seseorang berbahasa, termasuk menulis, akan mencerminkan pula bagaimana orang itu menata jalan pikirannya.

Halliday (Sobur, 2004: 17) menyatakan, bahasa memiliki fungsi-fungsi seperti berikut:

- 1) fungsi ideasional: untuk membentuk, mempertahankan, dan memeperjelas hubungan diantara anggota masyarakat.
- 2) Fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi diantara anggota masyarakat.
- 3) Fungsi tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus atau wacana yang relevan dengan situasi.

Kartomihardjo (1998: 1) menyatakan masyarakat pemakai bahasa secara sadar atau tidak sadar menggunakan bahasa yang hidup dan digunakan di masyarakat. Bahasa adalah kenyataan sosial yang harus dipandang sebagai suatu ekspresi sosial. Kehidupan jiwa seseorang tidaklah serupa dengan yang terdapat pada orang lain. Manusia dan bahasa adalah suatu kesatuan yang utuh, dimanapun manusia berada bahasa sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan bahasa segala ekspresi dan perspektif manusia dapat tercurahkan, bahasa merupakan kebutuhan pokok untuk manusia sebagai alat berinteraksi antar sesamanya, bahasa juga sebagai milik masyarakat yang tersimpan dalam masing-masing individu.

Teks menurut Halliday dan Hasan (1992) adalah semua bahasa hidup yang mengambil bagian tertentu dalam konteks situasi. Teks adalah suatu pilihan semantis data konteks sosial, yaitu suatu cara pengungkapan makna melalui bahasa lisan atau tulis. Teks dapat berbentuk sederhana, dan dapat pula berbentuk urutan kalimat yang panjang yang isinya tentu saja memiliki tujuan tertentu. Teks memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut, pertama teks terdiri atas makna-makna yang membentuk kesatuan makna yang dikodekan dalam bentuk kata dan struktur. Kedua, teks merupakan suatu bentuk pertukaran makna yang bersifat sosial. Ketiga, teks memiliki hubungan yang dekat dengan konteks. Konteks disini berperan sebagai penghubung antara teks lain yang menyertai teks. Konteks tidak hanya sesuatu yang dilisankan, tetapi juga kejadian non verbal lain

Dede Oetomo (Mulyana, 2005: 9), istilah teks lebih dekat pemaknaannya dengan bahasa tulis dan wacana pada bahasa lisan. Van Dyk (PWJ Nababan, 1987: 64) menyatakan, teks lebih bersifat konseptual. Dalam pandangan Halliday

(Santoso, 2008: 2), teks dimaknai secara dinamis. Teks adalah bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. Kemudian berkembang pemahaman mengenai teks lisan dan teks tulis, istilah-istilah yang sama persis dengan wacana lisan dan wacana tulisan.

Stefan Titscher dkk (2002: 55) membagi teks dalam dua fungsi. Pertama fungsi teks sebagai teks dan kedua fungsi teks sebagai representasi. Fungsi kedua ini kemudian dibagi menjadi dua yaitu dari ciri kelompok yang diteliti dan dari situasi yang diteliti. Berdasarkan penjelasan dari Titscher di atas terdapat perbedaan antara teks dengan materi penelitian pada fungsi pertama dapat disimpulkan bahwa teks itu sendiri merupakan obyek penelitian. Sedangkan fungsi kedua poin pertama, teks disusun berdasarkan beberapa proposisi ciri kelompok yang diteliti yang kemudian dianalisis dan menjadi sebuah wacana. Berdasarkan fungsi kedua poin kedua, teks bisa didekati sebagai sebuah refleksi komunikasi yang kentara dan menjadi indikator yang memungkinkan dilakukannya analisis terhadap situasi komunikatif yang ada kemudian bisa menimbulkan wacana.

b. analisis wacana kritis Teun A Van Dijk

Analisis wacana digunakan untuk menganalisis pemikiran tokoh, dalam hal ini pemikiran politik Gus Dur. Guy Cook (dalam Eriyanto, 2005: 9), menyebutkan tiga hal yang menjadi sentral dalam pengertian wacana, yaitu, teks, konteks, dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di atas kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, suara, dan lain-lain. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang

berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Wacana kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi.

Menurut Arikunto (Mulyana, 2005: 83), metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Berdasarkan kajiannya, metode ini menjelaskan data atau objek secara natural, objektif, dan faktual. Mulyana (2005: 84) memberikan langkah-langkah analisis deskriptif yang dapat dilakukan untuk menganalisis wacana dalam teks yaitu:

- 1) Memilih dan menentukan jenis wacana yang akan diteliti.
- 2) Menentukan unit analisis, jenis wacana yang telah ditetapkan untuk diteliti, segera dipilah dan ditentukan satuan data yang akan dijadikan dasar analisis.
- 3) Mendeskripsikan satuan data.

Penulis menggunakan analisis wacana kritis menggunakan metodenya Teun A Van Dijk dalam memahami wacana politik Gus Dur yang terkandung dalam buku “Islamku Islam Anda Islam Kita”. Hal ini dimungkinkan karena analisis wacana kritis lebih konkret dengan melihat bagaimana bahasa gramatika membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai. Bahasa, baik pilihan kata maupun struktur gramatika, dipahami sebagai pilihan

oleh seseorang untuk diungkapkan membawa makna ideologi tertentu (Badara, 2012 : 28).

Analisis wacana kritis model Van Dijk memberikan rumusan yang lengkap bagaimana memahami sebuah wacana. Dalam memahami wacana, Van Dijk melihat pula latar belakang tokoh, ruang hidup yang dialami tokoh hingga menghasilkan wacana demikian. Wacana yang digambarkan Van Dijk dengan tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiganya digabungkan menjadi satu kesatuan untuk menangkap wacana seseorang.

B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini bukanlah karya satu-satunya atau yang pertama membahas mengenai pemikiran politik Gus Dur. Terkhusus berkaitan dengan persoalan hubungan agama dan negara. Sebelumnya sudah ada berbagai penelitian yang menyajikan bahasan tersebut. Baik itu berupa buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi atau artikel di media massa. Adapun penulis disini bermaksud mencoba untuk melengkapi kajian yang sudah ada dengan menampilkan fokus yang belum terbahas pada penelitian yang lain.

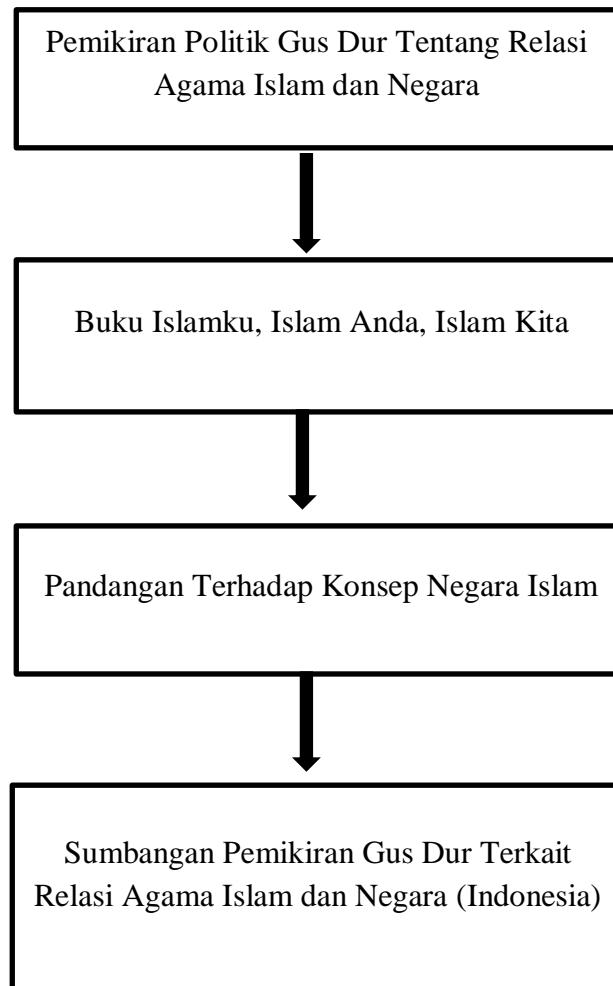
Adapun penelitian terdahulu yang dapat penulis temukan dari hasil penelusuran adalah sebagai berikut; Buku berjudul “Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur” yang ditulis Ali Masykur Musa. Buku ini menjelaskan peranan aktif Gus Dur dalam penerimaan Pancasila sebagai ideologi Negara bagi warga NU, tentu saja setelah merujuk ketentuan Al-Qur’an dan musyawarah anggota. Selain itu dalam masa kepemimpinannya beliau juga menjadikan pendidikan pesantren

tidak kalah hebat dengan pendidikan di sekolah-sekolah umum, dengan mengadakan reformasi dalam pendidikan intra pesantren.

Buku lainnya berjudul “Prisma Pemikiran Gus Dur”. Buku ini merupakan karya Gusdur, tulisan seluruhnya diambil dari majalah prisma, majalah fenomenal di tahun 70/80-an, yang kini diterbitkan oleh LKiS. Kajian dalam buku ini sangat luas, meliputi politik, ideologi, nasionalisme, gerakan keagamaan, pemikiran sosial dan budaya. Sehingga mushaf pemikiran Gus Dur terkumpul dengan judul “Prisma Pemikiran Gus Dur”, alasannya ialah karena tulisan ini diambil dari majalah prisma dan sifat tulisan yang kontemplatif dan reflektif.

Buku tersebut menyinggung reideologi dan retradisionalisasi dalam politik yang merupakan upaya membangun gerakan politik yang dinamis, tanpa menciderai nilai-nilai ke-Islaman. Selanjutnya dalam menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan, yang tidak harus dimaknai kaku, akan tetapi hukum Islam merupakan ajakan kepada pengembangan dan penyegaran. Ajakan seperti itu yang menjadikan kebutuhan sesaat, tetapi yang dimaksud ialah upaya yang membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan manusia kini hingga mendatang. Dengan kepekaan tersebut hukum Islam akan senantiasa mengadakan penyesuaian sekadar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang telah ditetapkan Allah (Al Qur’an dan Al Hadits).

C. Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian buku yang berjudul “Islamku, Islam Anda, Islam Kita”, maka ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam kaitannya topik hubungan negara dan Islam. Yakni sebagai berikut;

Pertama, tema pemikiran politik Gus Dur dalam kaitannya hubungan agama dan Islam menjelaskan soal negara Islam. Gus Dur mencoba mengeksplorasi teks sumber hukum Islam berupa al-Qur’an dan Sunnah untuk mencari pemahaman mengenai pondasi negara dalam Islam. Ia juga mencari dalil tentang apakah ada keharusan mendirikan negara Islam. Adapun hasilnya, Gus Dur tidak menemukan apa yang dicarinya tersebut. Islam bersumber al-Qur’an dan Sunnah tidak memberikan referensi yang lengkap terhadap topik negara Islam. Bahkan, tentang negara bagaimana dibuat dan bagaimana dipertahankan juga tidak ada referensinya. Hal ini menjadikan Gus Dur mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak memiliki konsep yang baku tentang negara. Jadi, bagi Gus Dur, apapun sistem pemerintahan dan bentuk negara itu diakui Islam. Asalkan mampu menciptakan kondisi yang membuat masyarakat mampu memperjuangkan nilai-nilai ke-Islaman sebagai konsekuensi muslimin.

Kedua, pemikiran terkait Islam dan Pancasila. Seringkali terjadi pertentangan antara kelompok yang mengaku sebagai kelompok Islam berhadapan dengan kelompok nasionalis. Seperti tidak ada kutub yang membawa kedua

kelompok tersebut bertemu pada satu titik. Dalam penelitian ini, penulis menemukan titik temu tersebut dari pemikiran Gus Dur. Bahwasannya ada titik temu antara Pancasila dengan Islam. Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bilamana ada elemen muslimin yang ingin menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim juga dipersilakan. Asalkan Islam hanya sebagai ideologi masyarakat, bukan ideologi negara. Maka dengan demikian menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Karena Pancasila yang dapat mempersatukan dan mengayomi seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Antara keduanya tidak harus dipertentangkan, melainkan ada kutub pertemuan yang sebaiknya dikedepankan untuk kebaikan bersama.

Ketiga, orientasi Islam dalam bernegara. Menurut Gus Dur, Islam tidak memberikan panduan tentang sistem dan bentuk negara. Jadi, semua sistem dan bentuk negara pada dasarnya diakui oleh Islam. Asal sistem tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang baku. Adapun Islam memberikan panduan tentang negara adalah mewujudkan nilai-nilai Islam yang membawa kemashlahatan dalam suatu tatanan masyarakat. Seperti halnya menciptakan masyarakat yang aman, adil, damai, menjamin kebebasan beribadah, dan sejahtera.

B. Saran

Saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah:

1. Kepada kelompok-kelompok Islam untuk membaca pemikirannya Gus Dur. Dimana Gus Dur sebagai umat muslim mencoba untuk mencari titik temu antara

Islam dan NKRI. Dimana keduanya saling melengkapi dan mengayomi antara satu dengan lainnya. Dengan membaca pemikirannya Gus Dur, diharapkan tidak ada lagi yang menggelindingkan aksi ataupun wacana mendirikan negara Islam di NKRI ini.

2. Kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk selalu mentadaburi Pancasila. Dalam artian mempelajari dan mengamalkan Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi *soko guru* bagi tegaknya negara Indonesia.
3. Bagi kelompok Islam di Indonesia yang anti Pancasila, sebagai warga negara Indonesia hendaknya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sebab, Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde baru*. Bandung: Mizan.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barton, Greg. 2008. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Eriyanto, 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Halliday, M. A. K dan Hasan, R. 1992. *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harb, Ali. 2012. *Nalar Kritis Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kaelan, 2002. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartomihardjo, S. 1998. *Bahasa dan Cermin Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Marianne W. Jorgensen dan Louise J Phillips. 2007. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mayer, Michael, Wodak, Ruth, Dan Vetter, Eva. 2000. *Metode Analisis Teks Dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Husein. 2015. *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*. Jakarta: Noura Books.
- Mulyana, 2005. *Kajian Wacana Teori, Metode, Dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. 2014. *Cak Nur Sang Guru Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Nasiwan. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Natsir, Mohammad. 2014. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noer, Deliar. 1982. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ramage, Douglas E. 2002. *Percaturan Politik Di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Ridwan, Nur Khalik., dkk. _____. *Hand Out Kelas Pemikiran Gus Dur*. Jakarta: The Wahid Institute.

Santosa, Riyadi. 2011. *Logika Wacana: Hubungan Konjungtif Dengan Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional*. Surakarta: UNS Press.

Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soegito, A.T., dkk. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suyahmo, 2016. *Filsafat Politik*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

---- 2014. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Wahid, Abdurrahman. 2010. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.

Jurnal

Arditama, Erisandi. 2016. Mengkaji ruang publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. Dalam *Politik Indonesia* Vol. 01 No. 01. Hal 83.

Khatibah. 2011. Penelitian Kepustakaan. Dalam *Iqra'* Vol. 05 No. 01. Hal. 38.

Munandar, Moh Aris dkk. 2012. Pembinaan Nilai Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal Semarang. Dalam *Unnes Civic Education Journal* Vol. 01. No. 01. Hal 17.

Internet

(*republika.co.id*, Kamis 31 Desember 2009), diakses pada Kamis, 18 Oktober 2018.

www.kpu.go.id, diakses pada Selasa, 11 Desember 2018.

repository.uin-malang.ac.id, diakses pada Selasa, 11 Desember 2018.